



KOMUNIKASI BENCANA DAN MANAGEMEN KEBENCANAAN DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDUNG

Oleh

Muchsin Al Fikri¹⁾, Sandra Irawaty²⁾, Yuyun Yuniarsih³⁾, Purnama Rachmanita⁴⁾

^{1,2,3,4}Universitas Sangga Buana Bandung

Email: ¹muchsinalfikri2020@gmail.com, ²nengsanira@gmail.com,
³yuyunyuniarsih79@gmail.com & ⁴purnamarachman2818@gmail.com

Abstrak

Dalam menangani sebuah bencana apalagi bencana nasional seperti pandemi Covid-19, masalah komunikasi bencana dan manajemen kebencanaan memegang peranan yang sangat strategis dalam menunjang efektifitas penanggulangan bencana baik dari mulai mitigasi, penanganan sampai pasca bencana. Namun dilapangan seringkali terjadi miskomunikasi, misinformasi bahkan mismanagemen sehingga apa yang diintruksikan oleh Pusat tidak sampai ke level paling bawah dan itulah yang menyebabkan terhambatnya penanganan sebuah bencana. Persoalan utamanya adalah apa yang disebut KIKK (Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerjasama). Ditambah lagi seringkali terjadi simpangsiur informasi sehingga sumber data menjadi tidak satu pintu. Hal ini menyebabkan tidak meratanya distribusi bantuan, tumpang tindihnya antar sektor dan rapuhnya koordinasi diantara gugus tugas Covid-19. Adapun Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk meneliti tentang Apa dan bagaimana komunikasi bencana dan manajemen kebencanaan itu. 2. Untuk meneliti tentang bagaimana pola komunikasi bencana dan manajemen kebencanaan yang efektif dalam penanganan bencana Covid-19 di Kota Bandung. Dan 3. Untuk meneliti tentang bagaimana model komunikasi resiko bahaya dalam penanggulangan bencana wabah Covid-19 di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun tahapannya adalah mengumpulkan beberapa referensi yang berkaitan dengan komunikasi bencana terkait pandemi Covid-19. Kemudian merumuskannya dalam bentuk rumusan masalah dan diperdalam melalui seminar. Tahap berikutnya adalah melakukan depth interview kepada nara sumber yang menguasai permasalahan ini lalu ditranskrip dan dianalisis. Kemudian disusun menjadi laporan penelitian

Kata Kunci: Komunikasi Bencana, Manajemen Bencana, Pandemi, Covid-19

PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019 seluruh dunia dikejutkan dengan kemunculan virus Corona yang berasal dari Wuhan, China. WHO menamainya dengan istilah Covid-19 (singkatan dari 'Co' yang artinya Corona, 'Vi' untuk Virus dan 'D' untuk disease/penyakit). Hanya dalam waktu beberapa bulan saja hampir satu juta orang lebih terpapar virus yang mematikan itu. World Health Organization (WHO) pun menetapkan Covid-19 sebagai pandemik. Indonesia pun di awal 2020 menetapkan pandemik Covid-19 sebagai bencana nasional sejak Sabtu (14/3).

Dalam menangani sebuah bencana apalagi bencana nasional seperti pandemi Covid-19, masalah komunikasi bencana dan manajemen kebencanaan memegang peranan yang sangat strategis dalam menunjang efektifitas penanggulangan bencana baik dari mulai mitigasi, penanganan sampai pasca bencana.

Namun dilapangan seringkali terjadi miskomunikasi, misinformasi bahkan mismanagemen sehingga apa yang diintruksikan oleh Pusat seringkali tidak sampai ke level paling bawah dan itulah yang menyebabkan terhambatnya penanganan



sebuah bencana. Persoalan utamanya adalah apa yang disebut KIKK (Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerjasama). Ditambah lagi seringkali terjadi simpangsiur informasi sehingga sumber data menjadi tidak satu pintu. Hal ini menyebabkan tidak meratanya distribusi bantuan, tumpang tindihnya antar sektor dan rapuhnya koordinasi diantara gugus tugas Covid-19 di semua level. [1]

Penelitian ini akan mengkaji tentang problematika tersebut di atas dan menawarkan strategi komunikasi dan manajemen dalam penanggulangan pandemi Covid-19 sebagai sebuah gerakan yang terintegrasi dan sistemik. Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan manajemen bencana modern secara komprehensif yang mencakup aspek *mitigation* (deteksi bencana), *Preparedness* (kemampuan bertahan), *Response* (mengurangi dampak bencana) dan *Recovery* (perbaikan atau rekonstruksi). [2]

Permasalahan Komunikasi bencana dan manajemen kebencanaan ini sangat menarik untuk diteliti karena selain peristiwanya baru pertama kali terjadi juga melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat juga berdampak kepada seluruh sektor kehidupan. Jadi kasus ini memiliki dimensi sosial yang sangat luas dan kompleks.

Pemerintah Kota Bandung seperti level pemerintahan lainnya sama dihadapkan kepada kompleksitas penanganan bencana pandemi covid-19 ini. Upaya menyelamatkan 4 juta penduduk Kota Bandung supaya tidak terpapar virus bukan persoalan sederhana. Sebab mobilitas warga perkotaan jauh lebih tinggi dibanding daerah pedesaan. Hilir mudik warga baik yang masuk ataupun keluar dari Kota Bandung menyulitkan pemerintah Kota dalam menerapkan sebuah kebijakan.

Kerumitan penanganan ini lebih diperparah dengan lambannya tindakan birokrasi akibat terperangkap oleh birokrasi yang berbelit dan berjenjang. Oleh sebab itu sebaiknya para elit birokrasi dan para

pemegang otoritas penanggulangan bencana harus bergerak lebih fleksibel agar sigap dalam menghadapi bencana.

Penanganan bencana di Kota Bandung masih diwarnai oleh belenggu komunikasi linier dimana aparat level Kecamatan dan kelurahan selalu menunggu arahan dari Pimpinan dan tidak secara kreatif menjemput bola. Bahkan komunikasi paternalistik yang diwarnai dengan ewuh pakewuh menyebabkan penanganan korban menjadi terbengkalai.

Sudah saatnya Pemerintah Kota Bandung mengaplikasikan komunikasi integratif diantara institusi pemerintah beserta sub ordinat kekuasaannya, lembaga swasta maupun masyarakat pada umumnya. Pola komunikasi yang dibangun harus mampu memunculkan kesiapan aparatur.

Selain sering munculnya masalah kesimpangsiuran data korban akibat sumber data yang tidak melalui satu pintu, diperparah dengan menyusupnya aneka kepentingan dari berbagai kelompok yang ingin memanfaatkan bencana sebagai komoditas politik. Para pemburu kekuasaan mencoba peruntungan dalam wilayah bencana yang seolah tak bertuan untuk disulap menjadi lumbung suara guna memenangkan kompetisi lokal, regional maupun nasional.

Ilmu Komunikasi memiliki peran yang sangat strategis dalam penanganan sebuah bencana. Ilkom jangan hanya menjadi penanda akademis semata tapi harus memberikan guidance dalam merumuskan konsep penanganan bencana yang efektif dan efisien. Rumuskan pesan yang bisa menentramkan para korban dan hindarilah mengeksplorasi pesan dalam nuansa destruktif yang bisa menambah kedukaan, ketidakpastian dan kepanikan korban. Apalagi dalam kasus Covid-19 ini, penyampaian pesan yang tidak bijak akan menurunkan imunitas korban.

Demikian juga manajemen komunikasi bencana jangan hanya berkuat dalam



kompleksitas pengaturan pesan semata tapi diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran menghadapi bencana dari perspektif ilmu komunikasi. Pendeknya Komunikasi bencana adalah mengorganisasikan pesan dan bekerja keras untuk menghadapi kompleksitas bencana.

LANDASAN TEORI

Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Sementara itu kamus Wikipedia menjelaskan bahwa bencana sering diidentikkan dengan sesuatu yang buruk. Paralel dengan istilah *disaster* dalam bahasa Inggris. Secara etimologis berasal dari kata *DIS* yang berarti sesuatu yang tidak enak (*unfavorable*) dan *ASTRO* yang berarti bintang (*star*). *Disastro* berarti peristiwa jatuhnya bintang-bintang ke bumi.

Bencana adalah merujuk pada gangguan serius terhadap masyarakat, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, materi, atau kerugian terhadap lingkungannya sehingga masyarakat yang terkena dampak gangguan tersebut tidak mampu mengatasinya sendiri.

Sedangkan manajemen bencana didefinisikan sebagai pengorganisasian dan manajemen sumber daya serta tanggungjawab untuk menangani semua aspek kemanusiaan darurat, khususnya kesiapsiagaan, respon tanggap darurat dan pemulihan untuk mengurangi dampak bencana.

Hampir dalam setiap penanganan bencana nasional selalu muncul problematika di lapangan utamanya yang disebut KIKK (Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerjasama).

Penelitian ini akan memotret dan menganalisis keempat masalah di atas secara konseptual dan aplikatif di lapangan. Termasuk mengkaji dan menganalisis manajemen kebencanaan modern.

Sudah banyak penelitian tentang komunikasi bencana diantaranya saya sampaikan tiga paper yang membicarakan masalah di atas; 1. Jurnal ilmiah berjudul “Model Ideal Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung Operasional Penanganan Bencana Alam”, karya Edwi Arief Sosiawan, Desember 2014. [3]

Kongklusi dari penelitian ini adalah : Model ideal manajemen TIK dalam operasional penanggulangan bencana mensyaratkan adanya penambahan bagian Utusan Teknologi dalam struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bagian ini nantinya akan memiliki dua seksi yaitu seksi Operasional Administrasi dan Seksi Operasional Lapangan.

Penelitian ini bermaksud membuktikan epektifitas model tersebut melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan TIK yang menanamkan bidang TIK pada struktur BPBD terbukti memiliki kehandalan pada masa aman, masa bencana dan masa pasca bencana.

Kedua, Penelitian berjudul “Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat” karya Puji Lestari dkk, tahun 2012. Hasil penelitian ini adalah :

“Manajemen komunikasi bencana di Merapi sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari perencanaan sudah dilakukan dengan pembuatan Rencana Kontigensi. Pengorganisasian dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Pemda Sleman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB). Pada pelaksanaan, ada koordinasi secara rutin pihak- pihak terkait seperti BNPB, FPRB,



Pemda, bahkan berbagai media komunikasi di DIY. Proses evaluasi oleh BNPB, Pemda, dan FPRB berjalan rutin.

Ketiga, Penelitian ilmiah berjudul “Model Komunikasi Untuk Penunggu-Langan Bencana Gunung Merapi Melalui Aplikasi Plewengan”, karya Galih Kartika Barata, tahun 2018. Hasilnya adalah : [4]

Kesiapan Aplikasi Plewengan tidak bisa digunakan secara optimal melalui smartphone android, target penontonnya adalah masyarakat Yogyakarta, kesiapan lembaga pendukung seperti BBPTKG sudah siap, media digunakan untuk berbagi informasi dalam bentuk media massa, tradisional, media sosial, dan menemukan model komunikasi untuk Aplikasi Plewengan yang melibatkan Pemangku Kepentingan Utama, Pemangku Kepentingan Premiere, Pemangku kepentingan Sekunder yang dapat diketahui, tertarik, akhirnya dapat mengakses sehingga fungsi penerapan Aplikasi Plewengan bisa tepat target dan optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan case study (studi kasus). Metode dan pendekatan ini lebih pas digunakan dalam menjawab permasalahan ini. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap kasus wabah Covid-19 dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. [5]

Adapun objek penelitian ini adalah masalah komunikasi, informasi, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintahan. Hampir dalam setiap bencana nasional maupun lokal dimana kondisinya tidak berjalan secara normal, selalu muncul

miskomunikasi, misinformasi tumpang tindih kewenangan bahkan saling mengandalkan. Hal itu menyebabkan proses manajemen bencana tidak tertata secara rapih. Terlebih dalam menghadapi bencana Covid-19 yang multidimensi.

Lokasi penelitian ini di Wilayah Pemerintah Kota Bandung, karena meneliti seputar kebijakan Pemerintah Kota dalam penanganan bencana Covid-19 di Kota Bandung.

Untuk mencapai tujuan, maka kami sudah membuat job description bagi ketua dan anggota serta asisten. Job description tersebut adalah Ketua Bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan penelitian dan mengkoordinir seluruh aktivitas penelitian dari awal sampai akhir dan Siap bekerja 24 Jam / Bulan. Adapun untuk Anggota Membantu ketua Pelaksana dalam proses penelitian seperti mewawancarai informan dan nara sumber, mengumpulkan data, menganalisis data dan menyusun laporan penelitian dan siap bekerja 24 Jam / Bulan. Sedangkan Asisten membantu secara administratif kepada Ketua dan Anggota Peneliti serta membantu mentranskrip hasil wawancara dan siap bekerja 24 jam / Bulan. [6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menangani bencana nasional pandemi Covid-19 di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 443/Kep.239-Dinkes/2020.

Hal ini sesuai dengan surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SE.1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus



Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.

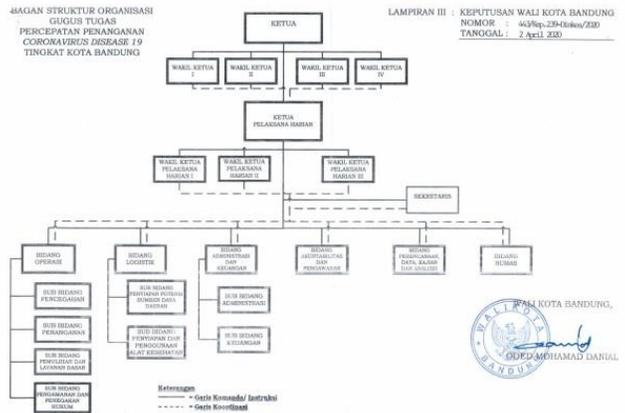
Gugus Tugas tersebut memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu : a. Merencanakan kebijakan dalam mempercepat penanganan wabah penyakit akibat Coronavirus Disease 19 melalui sinergi antar lintas sektor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Coronavirus di Kota Bandung. c. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap Covid-19 di Kota Bandung. d. Melaksanakan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi koordinasi Rumah Sakit rujukan, koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan pra rujukan dan manajemen sumber daya kesehatan. E. Melaksanakan komunikasi publik meliputi konten dan kreatif, edukasi masyarakat serta komunikasi melalui media massa dan media sosial, edukasi masyarakat dan kampanye.

Kepwal ini juga memerintahkan kepada seluruh Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Jika dilihat dari susunan pengurusnya, Gugus Tugas ini merupakan manajemen terbanyak personalianya dalam sejarah karena melibatkan hampir seluruh struktur pemerintahan daerah. Gugus Tugas yang dikomandani langsung oleh Walikota ini melibatkan ratusan personalia dengan tujuh bidang yaitu : a. bidang akuntabilitas dan pengawasan yang dikomandani oleh inspektur Kota Bandung, b. Bidang perencanaan, Data, Kajian dan Analisis yang dikomandoi oleh kepala Balitbang Kota Bandung, c. Bidang Hubungan Masyarakat yang dikomandani oleh Kepala Kominfo Kota Bandung, d. Bidang Operasi yang dikomandani oleh Kepala Dinkes Kota Bandung, e. Bidang Logistik yang dikomandani oleh kepala dinas Indag Kota Bandung, f. Bidang Administrasi dan keuangan

yang dikomandani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Adapun susunan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kota Bandung dapat dilihat dari bagan di bawah ini ;



Salah satu inovasi komunikasi untuk mengkomunikasikan kebijakan Pemkot yaitu melalui saluran informatif yang disebut Pusat Informasi COVID-19 (Pusicov) Kota Bandung. Melalui Pusicov ini semua warga bisa mengakses secara real time jumlah korban covid-19 di Kota Bandung.



Kota Bandung termasuk kota yang jumlah korban covid-19 nya relatif tinggi. Pusicov merilis data terbaru angka kejadian virus corona pada, Sabtu (4/4/2020) Pukul 08.00 WIB. Warga Kota Bandung yang dilaporkan positif terpapar corona, bertambah 13 orang dan pasien positif yang sembuh bertambah dua orang.

Seperti diketahui warga Kota Bandung yang terkonfirmasi positif Covid-19, Jumat (3/4) kemarin mencapai 22 orang, saat ini total menjadi 35 orang. Sementara itu 21 orang masih dirawat, enam orang sembuh dan delapan orang lainnya meninggal dunia.



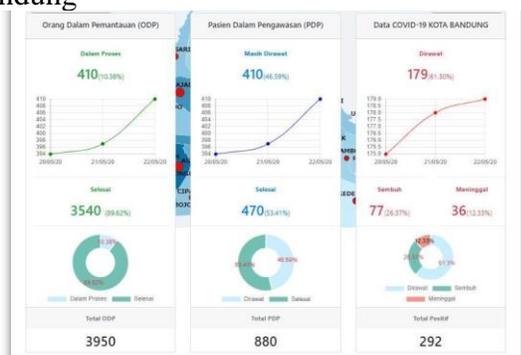
35 orang positif tersebar di Kecamatan Andir 3 orang, Antapani 1 orang, Arcamanik 1 orang, Babakan Ciparay 3 orang, Bandung Kidul 1 orang, Bandung Wetan 2 orang, Buahbatu 2 orang, Cibeunying Kidul 2 orang, Cicendo 7 orang, Coblong 2 orang, Kiaracondong 4 orang, Lengkong 1 orang, Mandalajati 1 orang, Rancasari 1 orang, Regol 3 orang dan Sumur Bandung 1 orang.

Enam orang sembuh di antaranya di Kecamatan Babakan Ciparay 2 orang, Cicendo 1 orang, Coblong 1 orang, Kiaracondong 1 orang dan Regol 1 orang.

Sementara delapan orang meninggal dunia merupakan warga Kecamatan Sukasari 1 orang, Cicendo 2 orang, Andir 1 orang, Kiaracondong 1 orang, Lengkong 1 orang, Regol 1 orang dan Bandung Kidul 1 orang.

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) terus bertambah. Total ODP 1.834 orang, di mana sedang dilakukan pemantauan 969 orang dan yang telah selesai proses pemantauan sebanyak 865 orang.

Selain itu, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) total 200 orang, di mana yang masih melakukan perawatan 142 orang. Sedangkan, PDP yang sudah dinyatakan pulang dan sehat sebanyak 58 orang. ODP dan PDP tersebar di 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung



Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan kebijakan sebagai berikut;

1. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Melalui Peraturan Walikota Bandung (Perwal) Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019, Pemkot Bandung berupaya mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kota Bandung. Perwal ini berisi 9 Bab dengan 41 Pasal. Perwal ini ditetapkan pada tanggal 19 April 2020. Pelaksanaan PSBB dimulai tanggal 22 April 2020.

Dengan mengacu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MEN-KES/259/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.240- Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kota Bandung telah ditetapkan menjadi daerah yang wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pemberlakuan PSBB dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal terutama pada wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang termasuk dalam zona merah rawan penularan Covid-19. PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota [Bandung](#) mengadakan rapat terbatas di Balaikota [Bandung](#), Senin (4/5/2020). Rapat tersebut mengevaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar ([PSBB](#)) di Kota [Bandung](#). Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota [Bandung](#) Oded M Danial mengatakan, [PSBB](#) ini sangat efektif melandaikan curva penyebaran Covid-19 di Kota [Bandung](#). Dengan demikian bisa dikatakan [PSBB](#) ini bisa dianggap sukses



mengurangi angka penyebaran Covid-19 di [kota Bandung](#). Bahkan menurut Oded, dari data yang diperoleh dirinya, selain melandainya penyebaran kasus positif Covid-19, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) pun mulai melandai.

Kemudian pada tanggal 21 April 2020, Pemkot kembali menerbitkan Perwal Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perwal Nomor 14 Tahun 2020. Isi Perwal ini merubah beberapa hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, pengaturan operasional pasar induk dan pasar tradisional, penggunaan kendaraan mobil penumpang pribadi, pengguna sepeda motor pribadi dan pembatasan jam operasional Gojek.

2. Perpanjangan PSBB

Setelah melihat adanya trend kenaikan jumlah korban positif, Pemkot Bandung kemudian menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 29 tentang perpanjangan PSBB di Kota Bandung. Perpanjangan ini dimulai dari tanggal 20 Mei 2020 selama 14 hari.

Selain mengikuti kebijakan dari Pemerintah Provinsi, langkah Pemerintah Kota Bandung memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menjaga kewaspadaan warga terhadap penyebaran Covid-19. Apalagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dinilai mampu mengendalikan Covid-19.

Berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung masih berada di level 3 atau cukup berat. Sehingga langkah untuk PSBB tetap harus dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona agar tidak meluas.

Seperti siaran pers dari Humas Kota Bandung, Pemkot Bandung mengklaim telah mampu terus menekan angka reproduksi atau jangkauan penularan di kisaran angka 1. Namun dalam waktu 14 hari terakhir ini masih bergerak secara fluktuatif. Sempat menekan hingga angka 0,42 tetapi pergerakannya sempat kembali ke angka 1,40.

Gugus Tugas juga mampu menekan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Perawatan (PDP) dan positif Covid-19. Hal ini karena Gugus Tugas mampu melacak penyebaran Covid-19. Pelacakan bisa optimal karena Kota Bandung memiliki Laboratorium Biosafety Level 2 (BSL-2) yang sudah menguji 198 sampel perhari dari kapasitasnya 200 sample per hari.

Bahkan dalam satu pekan terakhir, Dinas Kesehatan melalui portal Pusat Informasi Covid-19 Kota Bandung merilis data kasus positif sejak 23–29 Mei tertahan pada angka 302 orang. Dengan rincian 160 pasien masih dirawat, 38 orang meninggal dunia dan 104 lainnya berhasil sembuh.

2. Perpanjangan PSBB Lanjutan (29 Mei 2020)

Pemkot Bandung pada tanggal 12 Juni 2020 kembali menerbitkan Perwal Nomor 34 Tahun 2020 Tentang PSBB dengan memberikan izin aktivitas beberapa bidang kehidupan dengan protokol kesehatan yang super ketat. Seperti pembukaan kantor-kantor Pemda, Instansi Pemerintahan, kantor BUMD, kantor notarisperhotelan, konstruksi, rumah makan, restoran, Mall, kegiatan industri dll.

Pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) level di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dinyatakan telah berakhir setelah penerapannya berlangsung selama dua pekan ke belakang, di Kota Bandung, PSBB belum berakhir. Pemerintah Kota Bandung memperpanjang masa PSBB hingga tanggal 29 Mei 2020 mendatang, terhitung sejak hari ini. Keputusan tersebut diambil setelah Wali Kota Bandung Oded M Danial yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Bandung mengadakan rapat terbatas dengan pimpinan Forkopimda. "Ratas Forkopimda Kota Bandung merespons kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal PSBB yang dilaksanakan Provinsi Jawa Barat. Hasil rapat kita sepakat PSBB di Kota Bandung dilanjutkan hingga 29 Mei 2020," kata Oded dalam konferensi pers di Balai Kota Bandung, Selasa (19/5/2020). Lebih



lanjut Oded menambahkan, pihaknya akan langsung membuat Surat Keputusan Wali Kota Bandung yang menjelaskan tentang perpanjangan masa PSBB di Kota Bandung. Sementara untuk jenis larangan dan sanksi pelanggaran PSBB masih tetap mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019. "Perwal masih pakai yang lama. Keputusannya diambil karena setelah diskusi dari kita lihat dari berbagai aspek kesehatan, aspek ekonomi, juga aspek sosial keagamaan,"

3. PSBB Proporsional

Pada saat Pemerintah Provinsi memperpanjang PSBB 30 Mei – 12 Juni 2020, Pemerintah Kota Bandung menerapkan PSBB Proporsional. Rapat Terbatas (Ratas) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Bandung yang diselenggarakan di Ruang Tengah Balai Kota, Jumat (29/5/2020), memutuskan Kota Bandung akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung yang juga Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengatakan, ratas membahas evaluasi pelaksanaan PSBB Bandung Raya dan PSBB Jawa Barat di Kota Bandung. Dari hasil evaluasi tersebut, ratas memutuskan Kota Bandung akan memberlakukan PSBB Proporsional.

Untuk mempertegas pelaksanaan PSBB Proporsional, wali kota akan mengeluarkan peraturan. "PSBB ini akan dimulai dari komunitas yang dampak dan potensi penularan virusnya paling rendah, lalu akan kita evaluasi terus sehingga secara bertahap akan terus berubah," kata Oded.

Pada pemberlakuan PSBB Proporsional, sektor-sektor yang dikecualikan akan ditambah. Berdasarkan kesepakatan para pimpinan daerah, komunitas yang akan diperbolehkan beroperasi pertama kali adalah rumah ibadah.

"Tempat ibadah (boleh dibuka), namun akan dibatasi 30%. Semuanya (dilaksanakan) dengan protokol kesehatan," jelasnya.

Sektor lain yang akan diperbolehkan adalah perkantoran, baik lembaga milik pemerintah maupun swasta. Pertokoan mandiri pun akan dipersilakan beroperasi. Namun Pemkot Bandung masih belum mengizinkan mal dan pusat perbelanjaan beroperasi.

Oded menekankan, sektor-sektor yang dikecualikan harus tetap mempertahankan aktivitas maksimal 30%. Ia mencontohkan, restoran boleh membuka makan di tempat, tetapi hanya 30% kapasitas tempat duduk itu yang diperkenankan untuk dibuka.

Untuk sekolah, lanjut Oded, belum akan dibuka selama masa PSBB Proporsional ini. Menurutnya, sekolah menjadi sektor terakhir yang akan dikecualikan dari PSBB karena ada kekhawatiran terjadi penularan di sekolah.

Selama masa PSBB Proporsional, tambahnya, titik pengecekan di perbatasan akan dihilangkan. Petugas kepolisian akan mengalihkan penjagaan untuk memastikan sektor-sektor yang dikecualikan melaksanakan protokol yang sudah ditetapkan.

Terkait dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Oded menegaskan, tetap akan diberikan selama masa PSBB Proporsional. Para penerima bantuan akan tetap mendapatkan haknya sampai bulan Juli 2020.

4. Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

Setelah penerapan PSBB dianggap berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19 sebagaimana diklaim oleh Pemkot Bandung, untuk mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, Pemkot kembali menerbitkan Perwal Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Perwal yang ditandatangani 3 Juli 2020 ini mengatur secara detail tentang pedoman pelaksanaan AKB di semua bidang kehidupan seperti pedoman di tempat kerja, perkantoran,



fasilitas pelayanan kesehatan, di pasar tradisional dan sejenisnya, Pusat perbelanjaan/Mall/Toko Modern/Petokoan, Rumah makan/Restoran, Sarana dan kegiatan olah raga, Moda transportasi, ekonomi kreatif, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, Jasa Penyelenggaraan Even/pertemuan, Pelaku usaha Mikro Kecil Menengah, PKL dll.

5. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro

Pada tanggal 13 Juli 2020 kembali Pemkot membuat kebijakan PSBB berskala Mikro. Untuk mengeliminasi dan memutus mata rantai penularan Covid-19, melalui Perwal Bandung Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro, Pemkot terus berupaya menekan tingginya angka korban dengan PSBM dengan masa inkubasi 14 hari.

Pada bagian keempat tentang penanganan dampak pada pasal 9, Pemkot dapat melakukan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*), penyiapan fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga dan pelayanan pembelajaran bagi anak-anak.

Perwal tentang AKB ini tengah mengalami dua kali perubahan perwal yaitu Perwal nomor 43 tahun 2020 dan Nomor 46 Tahun 2020.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung merupakan daerah tujuan wisata sehingga hilir mudik manusia dalam jumlah besar tidak bisa dihindarkan. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Mang Oded terus berupaya mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Melalui sebuah aplikasi Pusicov, Pemkot Bandung dianggap berhasil menyampaikan komunikasi bencana berupa laporan jumlah korban kepada warganya secara real time.

Pemkot Bandung telah melaksanakan beberapa kebijakan terkait kebencanaan ini

melalui penerapan PSBB, PSBB Proporsional, AKB dan PSBM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Budi HH, "Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi dan Kerjasama)," *J. ASPIKOM*, vol. 1, no. 4, p. 362, 2012, doi: 10.24329/aspikom.v1i4.36.
- [2] P. Lestari, A. Prabowo, and D. A. Wibawa, "Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat," *J. Ilmu Komun.*, vol. 10, pp. 173–197, 2012.
- [3] E. A. Sosiawan, "Model Ideal Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung Operasional Penanganan Bencana Alam," *J. IPTEKKOM J. Ilmu Pengetah. Teknol. Inf.*, vol. 17, no. 2, p. 175, 2015, doi: 10.33164/iptekkom.17.2.2015.175-188.
- [4] G. K. Barata, P. Lestari, and R. Hendariningrum, "Model Komunikasi Untuk Penanggulangan Bencana Gunung Merapi Melalui Aplikasi Plewengan," *J. Commun. Spectr.*, vol. 7, no. 2, pp. 31–45, 2018, doi: 10.36782/jcs.v7i2.1782.
- [5] U. T. Umar and U. J. Ghafur, "METODOLOGI PENDEKATANKUANTITATIF DAN KUALITATIF Pendahuluan," no. iii, pp. 27–37.
- [6] tim 2019, "Pedoman Penyusunan Proposal dan Skripsi," 2019.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN